

BAB II

SEJARAH ALIANSI AMERIKA SERIKAT DENGAN KOREA SELATAN

A. Kependudukan Jepang di Korea (1897-1949)

Amerika Serikat memulai kerjasama dengan Korea Selatan pada tahun 1950 ketika masih tegangnya perseteruan antara Blok Barat (NATO) dengan Blok Timur (Warsaw Pact) yang dimana tahun tersebut merupakan awal mulainya Perang Korea seperti yang dijelaskan sebelumnya. Awalnya, pemerintahan Korea sedang berada pada kekuasaan Jepang (1897-1910) sebelum Perang Dingin di mulai. Setelah satu dekade, Jepang menang melawan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905), bagaimanapun masyarakat Korea tetap melawan demi kemerdekaan mereka; setelah melalui serangkaian manuver, yang termasuk pembunuhan anggota keluarga kerajaan Korea, Jepang memperoleh pengaruh di Korea yang akhirnya pada tahun 1910, Jepang secara resmi mengambil kontrol penuh Korea (Schnabel, 1972). Semenjak itu, banyak kaum intelektual dan nasionalis melarikan diri ke Shanghai dan membentuk pemerintahan sementara Korea pada tahun 1919 yang hanya di akui oleh beberapa negara. Di tahun 1919 hingga 1925, mulai terjadi pemberontakan terhadap Jepang yang dilakukan oleh kaum Komunis Korea (Stokesbury, 1990).

Pada tahun 1937, Gubernur-Jenderal Minami Jiro yang melihat pemberontakan ini sebagai ancaman memberlakukan tindakan asimilasi budaya Jepang terhadap 23,5 juta penduduk Korea dengan melarang segala bentuk budaya Korea baik itu bahasa, sastra, atau lainnya lalu di ganti dengan budaya Jepang serta memerintahkan semua masyarakat Korea mengganti nama mereka menjadi nama orang Jepang. Lalu pada tahun 1938-1939, pemerintahan kolonial Jepang menjalankan sistem kerja paksa atau kerja butuh (Romusha) yang menyebabkan sekitar 2,6 juta orang Korea bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja paksa; di tahun 1942, para pria di Korea si paksa menjadi tentara Jepang. Sementara itu di Tiongkok, kelompok-kelompok nasionalis seperti Tentara Revolusioner Nasional (Guomin Geminjun) dan Tentara Pembebasan Rakyat (Renmin Jiefangjun) meorganisir patriot Korea yang mengungsi.

Pertempuran pun terjadi pada bulan Desember 1941-Agustus 1945 di Burma yang di pimpin oleh Yi Pom-Sok dan Kim Il-Sung bersama kelompok Komunis melawan Jepang di Korea (Cumings, 2005). Bersamaan dengan pemberontakan masyarakat Korea kepada kolonial Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima yang menyebabkan kekuatan Jepang langsung merosot drastis. Akhirnya Jepang kalah dan Korea berhasil di pegang kembali oleh masyarakatnya untuk beberapa lama. Pada tahun berikutnya, Amerika Serikat dengan Uni Soviet membuat sebuah perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua, antara utara dan selatan tanpa keterlibatan pihak Korea karena waktu Korea diwakilkan oleh kolonel Amerika Serikat Dean Rusk dan Charles Bonesteel. Dua tahun kemudian di Konferensi Kairo pada bulan November 1943, yang dihadiri oleh para pemimpin dari Nasionalis Tiongkok, Britania Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat memutuskan bahwa Korea harus menjadi negara merdeka (Early, 1943). Dan pada bulan Februari 1945, Sekutu gagal mendirikan perwakilan di Korea yang diwacanakan pada tahun 1943.

Di samping itu, sesuai perjanjian Amerika Serikat dengan Uni Soviet, Uni Soviet pun mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan melancarkan serangan di Korea pada tanggal 9 Agustus 1945 yang akhirnya pada tanggal 10 Agustus 1945, Red Army dari Uni Soviet berhasil membebaskan Korea dari kekuasaan Jepang dan menduduki wilayah utara Korea dengan pendaratan amfibi di bagian utara paralel 38 lalu masuk melalui Manchuria. Pemisahan Korea secara nyata di mulai pada Konferensi Potsdam pada bulan Juli-Agustus 1945 dimana Sekutu secara sepihak memutuskan untuk membagi Korea tanpa adanya keterlibatan atau konsultasi dengan pihak Korea sendiri. Dan keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat Konferensi Kairo (1943) yang dimana saat itu Churchill, Chiang Kai-shek, dan Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan bahwa Korea harus menjadi negara bebas dan merdeka. Di tambah sebelumnya di Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945, Stalin dari Uni Soviet diizinkan untuk membangun “zona penyangga” Eropa sebagai imbalan karena telah membantu Amerika Serikat di Perang Pasifik melawan Jepang.

Pada tanggal 10 Agustus 1945, wilayah utara yang dikuasai oleh Uni Soviet sebagaimana yang telah disepakati menduduki paralel utara 38 dan pada tanggal 26 Agustus 1945 Red Army berhenti di wilayah tersebut menunggu selama tiga minggu sampai kedatangan pasukan Amerika Serikat di Selatan. Lalu dengan semakin dekatnya dengan jadwal kapitulasi Jepang yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945, Amerika Serikat mulai meragukan niat Uni Soviet untuk mengakui peran mereka dalam “komisi bersama” dalam arti perjanjian pendudukan Korea yang disponsori oleh Amerika Serikat. Awal terbentuknya paralel 38 ketika Kolonel Dean Rusk dan Charles Bonesteel membagi semenanjung Korea menjadi dua bagian dengan garis lintang 38 derajat setelah secara terburu-buru memutuskan bahwa daerah pendudukan Amerika Serikat di Korea harus memiliki paling tidak dua pelabuhan.

Jenderal John R. Hodge yang diberikan kepercayaan secara langsung mengontrol Korea yang di wilayah selatan setelah baru saja bebas dari kolonial Jepang. John R. Hodge memperkuat kontrolnya dengan dua cara, yaitu pertama dengan mengembalikan kekuasaan administrator-administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolaboratornya; yang kedua dengan menolak pengakuan USAMGIK (United States Army Military Government in Korea) terhadap Republik Rakyat Korea (Agustus-September 1945), dua cara ini dilakukan karena pemerintahan sementara Korea saat itu yang berada di semenanjung Korea dianggap menganut Komunisme. Amerika Serikat yang waktu itu menolak Komunisme yang ada di Korea menyebabkan gejolak dalam masyarakat Korea dan menyebabkan munculnya Perang Saudara Korea. Dan pada Desember 1945, Korea di bawah Komisi Bersama AS-Uni Soviet menyetujui Konferensi Menteri Luar Negeri Moskwa pada bulan Oktober 1945, yang lagi-lagi tanpa melibatkan pihak Korea. Hasil dari komisi tersebut yakni memutuskan bahwa negara tersebut akan merdeka setelah lima tahun di bawah kepemimpinan dewan perwakilan, dan dari hasil tersebut rakyat Korea marah dan memulai revolusi di selatan, ada beberapa yang protes dan sisanya mengangkat senjata sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka. Dan akhirnya pada tanggal 12 Desember 1945, USAMGIK mencabut perlindungan hukum terhadap Pemerintahan Revolusioner dan Komite Rakyat dari Republik Rakyat Korea.

23 September 1946 di Pusan, USAMGIK kehilangan kekuasaannya karena aksi unjuk rasa yang dilakukan 8.000 pekerja kereta api Korea yang menyebabkan aksi tersebut dilakukan oleh rakyat Korea yang ada di wilayah Korea yang dikuasai Amerika Serikat. USAMGIK kemudian mendeklarasikan hukum perang untuk mengontrol Korea Selatan. Kelompok Representative Democratic Council yang dipimpin oleh Syngman Rhee, tidak menyetujui sistem perwakilan Soviet-Amerika di Korea dan berpendapat bahwa setelah berada dalam kekuasaan kolonial Jepang selama tiga puluh tahun (1910-1945) rakyat Korea menolak dipimpin pemerintah asing lainnya termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Demi memperoleh keuntungan dari memanasnya situasi, Amerika Serikat keluar dari Persetujuan Moskwa dan membentuk pemerintahan sipil anti Komunis di Korea Selatan serta Amerika Serikat mengadakan pemilu yang kemudian di tentang dan di boikot oleh Uni Soviet untuk memaksa Amerika Serikat agar tetap mematuhi Persetujuan Moskwa.

Korea Selatan pun dari pemeritahan anti Komunis secara resmi mengumumkan konstitusi politik nasional (17 Juli 1948) dan memilih Syngman Rhee (20 Juli 1948) sebagai Presiden pertama Republik Korea Selatan (Republic of Korea) pada tanggal 15 Agustus 1948 dan di bagian utara Uni Soviet mendirikan pemerintahan Komunis di sana dengan Kim Il-Sung sebagai pemimpinnya. Para anggota Komunis yang berada di Korea Selatan di usir oleh Syngman Rhee dari perpolitikan nasional, dan akhirnya mereka ke pengasingan di daerah bukit dan bersiap melakukan perang gerilya melawan Korea Selatan yang di dukung oleh Amerika Serikat.

Para pemimpin negara baik itu Syngman Rhee maupun Kim Il-Sung bermaksud menyatukan Korea tetapi dengan sistem politik yang dianut masing-masing pihak. Karena persenjataan yang lebih canggih pada waktu itu, Korea Utara berhasil meningkatkan ketegangan di perbatasan yang kemudian meyerang setelah sebelumnya melakukan provokasi. Lain hal dengan Korea Selatan yang dengan bantuan terbatas dari Amerika Serikat, tidak mampu menghadapi serangan Korea Utara. Di awal Perang Dingin, Amerika Serikat beranggapan bahwa semua Komunis dari bangsa apapun adalah anggota Blok

Komunis yang dikontrol atau setidaknya mendapat pengaruh dari pemerintahan Moskwa dan akibatnya Amerika Serikat menganggap perang sipil di Korea waktu itu sebagai serangan dari Uni Soviet.

B. Perang Korea (1950-1953)

Di tahun 1949, Amerika Serikat meninggalkan Korea Selatan dengan sedikit persenjataan dan lain hal dengan Korea Utara yang memperoleh banyak bantuan senjata dari Uni Soviet serta mendukung rencana invasi Kim Il-Sung. Pada tanggal 25 Juni 1950, Perang Korea di mulai dengan Korea Utara yang mengirim 75.000 tentara menyebrangi paralel 38 dengan bantuan suplai dari Uni Soviet (Millett, n.d.). Pasukan Korea Utara bertujuan untuk menangkap “bandit pengkhianat Syngman Rhee” dan mengeksekusinya; akhirnya kedua Korea saling menyerang satu sama lain. Beberapa jam kemudian, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengecam aksi invasi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan, melalui Resolusi 82 DK PBB meski Uni Soviet dengan hak vetonya memboikot pertemuan sejak Januari. Tanggal 27 Juni 1950, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memerintahkan angkatan udara dan laut Amerika Serikat untuk membantu Korea Selatan. Dan dari Resolusi 83, pada tanggal yang sama Dewan Keamanan PBB memberikan bantuan militer kepada Korea Selatan. Ketegangan pun terjadi ketika Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet menuduh Amerika Serikat yang memulai intervensi bersenjata atas nama Korea Selatan ketika menunggu pengumuman fait accompli dari Dewan Keamanan PBB. Uni Soviet menentang legitimasi perang tersebut karena:

- 1) Pertama, data intelejen tentara Korea Selatan yang menjadi sumber Resolusi 83 didapatkan dari intelejen Amerika Serikat
- 2) Kedua, Korea Utara (Democratic People’s Republic of Korea) tidak di undang sebagai anggota sementara PBB, yang berarti melanggar piagam PBB Pasal 32
- 3) Ketiga, Perang Korea berada di luar lingkup piagam PBB, karena perang perbatasan Utara-Selatan awalnya dianggap sebagai perang saudara.

Perwakilan Uni Soviet juga memboikot PBB untuk mencegah tindakan Dewan Keamanan, dan menantang legitimasi tindakan PBB serta ahli hukum mengatakan bahwa untuk memutuskan suatu

tindakan diperlukan suara bulat dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Proses Perang Korea di mulai dari Korea Utara dengan invasi darat dan udara dengan 231.000 tentara lalu berhasil menguasai obyek dan wilayah sesuai dengan yang direncanakan seperti Kaesong, Chuncheon, Uijeongbu, dan Ongjin, yang mereka dapatkan setelah mengerahkan 274 tank T-34-85, 150 pesawat tempur Yak, 110 pesawat pengebom, 200 artileri, 78 pesawat Yak, dan 35 pesawat mata-mata. Di tambah dengan 114 pesawat tempur, 78 pesawat pengebom, 105 T-34-85, dan 30.000 orang tentara tambahan di Korea Utara. Di pihak lain, Korea Selatan masih belum siap. Korea Selatan hanya memiliki 98.000 orang yang terdiri dari 65.000 tentara tempur dan 33.000 tentara penyokong, tidak memiliki tank, dan 22 pesawat yang terdiri dari 12 pesawat tipe penghubung dan 10 pesawat latihan AT6 serta tidak ada pasukan Amerika Serikat di Korea walau ada pangkalan Amerika Serikat di Jepang. Dalam waktu beberapa hari saja banyak tentara Korea Selatan yang tidak loyal pada Syngman Rhee berkhianat dengan pergi ke Korea Utara dan bergabung dalam pasukannya.

Pada bulan Agustus 1950, Kongres Amerika Serikat mengizinkan alokasi dana US\$ 12 milyar untuk tambahan anggaran militer di Asia yang digunakan untuk mencapai NSC-68 (National Security Council Report 68). Pertempuran pertama dalam Perang Korea terjadi di Osan, dengan korban mencapai 180 orang tewas, terluka, dan tertangkap di tambah dari Divisi 24th US menderita 3.602 tewas atau terluka dan 2.962 ditangkap termasuk Mayor Jendral William F. Dean. Di bulan Agustus, Korea Utara telah berhasil menekan Korea Selatan dan tentara Amerika Serikat ke kota Pusan, tenggara wilayah Korea. Dari Korea Utara, banyak tentaranya yang melakukan tindakan sadis dengan membantai akademisi di Korea Selatan sehingga PBB tidak bisa tinggal diam untuk hal tersebut. Amerika Serikat dan PBB secara berkala mengirim pasukan dan peralatan militer ke Pusan, sehingga akhirnya di Pusan ada 500 tank dan 180.000 tentara yang menyerang balik 100.000 pasukan Korea Utara.

Pada tanggal 1 Oktober 1950, Kim Il-sung mengirim telegram ke Tiongkok untuk meminta bantuan militer yang di hari yang sama Tiongkok menerima telegram dari Stalin untuk segera mengirim pasukan ke Korea Utara. Karena belum terlatihnya pasukan Tiongkok dan Uni Soviet waktu itu, maka

pasukan tersebut di beri waktu satu bulan agar siap tempur. Tetapi tanggal 13 Oktober 1950, duta besar Uni Soviet di Beijing mengirim telegram pada Stalin yang mengatakan bahwa Komite Pusat Komunis Tiongkok menyetujui keputusan pengiriman pasukan ke Korea Utara walau pasukan tambahan tersebut belum benar-benar terlatih. Keadaan berbalik di Pusan mulai berbalik dengan Korea Selatan menyerang balik dan Korea Utara mulai kekurangan orang. Perang berlanjut ke Perang Incheon di mulai dengan serangan amfibi di Incheon dengan Amerika Serikat mengerahkan pasukannya yang terdiri dari 70.000 infantri dari Amerika Serikat dan 8.600 tentara Korea Selatan sehingga menghancurkan sebagian besar kota Incheon dan kemudian berhasil mengambil Seoul kembali. Sekitar 25.000 sampai 30.000 pasukan yang tersisa dari Korea Utara berhasil kembali ke Utara. Sebelumnya pada tanggal 1 Oktober 1950, PBB menyerang balik bersama dengan pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang akhirnya berhasil merebut Pongyang.

Di akhir bulan, PBB menahan 135.000 tawanan perang dari Korea Utara. Perang tersebut berlangsung selama tiga tahun (1950-1953) dan berakhir pada tanggal 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata meski sebenarnya tidak benar-benar berakhir karena Syngman Rhee menolak menandatangani, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Setelah selesainya Perang Korea, Amerika Serikat tetap melakukan hubungan diplomatik dengan Korea Selatan terutama untuk urusan militernya, Amerika Serikat pada waktu itu meningkatkan alokasi dana pengembangan militernya. Pada waktu itu, anggaran militer Amerika Serikat naik US\$ 50 milyar dan penambahan jumlah tentara Amerika Serikat yang di sebar ke wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Di sisi Korea Selatan dan Korea Utara karena setelah akhirnya gencatan senjata, keduanya menderita kerusakan besar baik itu di sektor ekonomi maupun infrastruktur karena pengemboman, serangan artileri, dan banyak korban jiwa dari kalangan pekerja. Korea Selatan pun berhasil melakukan modernisasi dan industrialisasi dengan bantuan dari Amerika Serikat.

C. Perang Vietnam (1955-1975)

Kerjasama pun di jalin antara kedua negara tersebut, salah satunya dalam Perang Vietnam (1955-1975) ketika Korea Selatan yang waktu itu di pimpin oleh Park Chung-hee berperan aktif dalam membantu Amerika Serikat dalam perang tersebut dengan mengirim 50.000 tentara di tahun 1968 dan total tentara Korea Selatan yang di kirim ke Vietnam dari tahun 1964-1973 mencapai 320.000 (Saad, 2013). Pada tahun 1969, tentara yang di kirim Amerika Serikat ke Vietnam mencapai 500.000 orang (Spector, n.d.). Di akhir Perang Vietnam, Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan terutama kekacauan di pasukan mereka seperti perpecahan sesama personil, masalah ras, dan sebagainya. Dilaporkan bahwa ada 700 kasus serangan dilakukan oleh sesama tentara Amerika Serikat yang terpecah belah di tahun 1968-1971, sebanyak 70.000 tentara Amerika Serikat menjadi desertir (Ferns, 2012). Di Korea Selatan sendiri di tahun 1973 pasukannya di tarik mundur dengan mengalami kerugian 5.099 tentara gugur, 10.962 mengalami luka, dan 4 orang dinyatakan hilang (Saad, 2013).

D. Era William Clinton (1994-2000)

Pada tahun 1994, di era kePresidenan William Clinton yang dimana saat itu Amerika Serikat memperoleh ancaman perang dari Korea Utara, memulai sebuah diplomasi dengan membuat kesepakatan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il dan dalam rentan waktu antara bulan April 1996 sampai November 2000 terjadi serangkaian kesepakatan antara kedua negara tersebut mengenai program pengembangan misil dan penjualan teknologi misil Korea Utara. Dari kesepakatan tersebut terbentuklah Geneva Agreed Framework yang disepakati pada tanggal 21 Oktober 1994 (Davenport, 2017). Di tahun 1997, Presiden Amerika Serikat William Clinton memulai program kerjasama militer dengan Korea Selatan dengan nama operasi Foal Eagle sebagai bagian dari rencana William Clinton untuk mengurus Korea Utara.

Kemudian pada tahun 1998, Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung membangun hubungan bilateral dengan Korea Utara melalui Sunshine Policy yang bertujuan untuk melunakan sifat Korea Utara

terhadap Korea Selatan dengan memperbanyak interaksi antar kedua negara dan membangun kerjasama ekonomi. Berbeda dari para pendahulunya yang menganggap Korea Utara sebagai musuh abadi, Kim Dae-jung beranggapan bahwa cara berpikir seperti itu hanya akan menambah ketegangan di Semenanjung Korea serta membuat Korea Utara semakin tidak bisa akur dengan Korea Selatan. Presiden Kim Dae-jung secara terbuka menyatakan tidak memiliki niat untuk mengambil alih Korea Utara, sehingga Sunshine Policy murni untuk memperkuat ikatan persaudaran antar kedua negara tersebut.

Presiden Amerika Serikat William Clinton juga di samping melaksanakan program Foal Eagle dengan Korea Selatan juga melakukan perjanjian dengan Korea Utara untuk memberi bantuan bahan bakar dan reaktor ke Korea Utara yang totalnya mencapai US\$ 4 milyar sebagai bagian dari Geneva Agreed Framework (Plunk, 1994). Kebijakan William Clinton terhadap Korea Utara saat itu tidak jauh berbeda dengan Korea Selatan demi melunakan Korea Utara terutama agar tidak membangun ulang pusat pengembangan nuklir yang sebelumnya telah di tutup karena Korea Utara menandatangani NPT (Nuclear Nonproliferation Treaty) di tahun 1994. Foal Eagle merupakan program latihan bersama yang di bentuk oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan yang beroperasi di wilayah perbatasan untuk keamanan. Operasi Foal Eagle ini biasanya lebih tertuju pada latihan operasi khusus, serangan darat, operasi amfibi, latihan serangan udara dan laut, serta CSOFEX (Counter Special Operation Forces Excercies).

William Clinton mengambil tindakan tersebut karena di nilai bahwa persetujuan antara kedua Korea ini bisa diselesaikan dengan cara damai. Dari tindakan tersebut terbentuklah KEDO (Korean Peninsula Energy Organization) yang merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang bertujuan untuk mengimplementasikan perjanjian tahun 1994 dimana Korea Utara memperbolehkan inspeksi Yongbyon Nuclear Research Center yang dicurigai mengembangkan senjata nuklir. Perjanjian tersebut ditepati Korea Utara sampai tahun 2002 dan karena selama beberapa tahun tersebut Korea Utara memperoleh bantuan ekonomi yang membuatnya mampu untuk memulai kembali produksi plutonium serta keluar dari perjanjian 1994 dan KEDO (Nuclear Threat Initiative Corporation, 2011).

Walau kebijakan ini di bilang berhasil, tetapi bagi Presiden Amerika Serikat waktu itu, Willam Clinton beranggapan bahwa kebijakan tersebut terlalu lembut dan bersifat naif. Bagi William Clinton, Sunshine Policy memberi kelonggaran ekonomi pada Korea Utara tanpa mempertimbangkan situasi politik di sana yang dapat mengancam. Dan akhirnya karena tidak memperoleh persetujuan dari Amerika Serikat, Kim Dae-Jung meminta bantuan dari Tiongkok agar dapat merealisasikan Sunshine Policy dan pertemuannya yang berada di Beijing. Meski tidak memperoleh persetujuan mengenai Sunshine Policy, Korea Selatan tetap menstabilkan hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Korea Utara.

E. Era George W. Bush (2001-2008)

Berbeda dengan William Clinton yang menggunakan jalan damai, George W. Bush menganggap bahwa William Clinton telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan Korea Utara kembali mengancam Korea Selatan. Di bulan Febuari 2001, Korea Utara meminta pertolongan Korea Selatan untuk menyuplai listrik, George W. Bush langsung memprotes Korea Selatan. Karena hal tersebut, kunjungan Kim Dae-jung ke Washington di bulan Maret 2001 berubah menjadi bencana (Liou, 2003). George W. Bush seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menganggap Korea Utara sebagai bagian dari Axis of Evil yang terdiri dari Iraq dan Iran juga (Hamblin, 2017). Alasan Presiden George W. Bush punya pemikiran seperti itu dikarenakan oleh Korea Utara, Iran, dan Iraq termasuk negara yang memproduksi senjata pemusnah masal. Di masa kePresidenannya, George W. Bush bersikap keras terhadap Korea Utara dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung tidak menyerah untuk usahanya meyakinkan Amerika Serikat untuk merubah pikirannya terhadap Korea Utara. Kim Dae-jung di panggil ke Washington DC untuk membahas soal kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan usaha dalam perang melawan terorisme yang saat itu benar-benar mengancam, dan George W. Bush menyatakan dia tidak akan meniru jalan yang dilakukan oleh William Clinton, paling tidak dalam waktu dekat (Sanger, 2001).

George W. Bush punya anggapan bahwa masalah nuklir Korea Utara bukan masalah Amerika Serikat saja, tetapi meliputi dunia internasional sehingga George W. Bush lebih memilih diplomasi

secara multilateral dalam masalah ini ketimbang melakukan diplomasi bilateral dengan Korea Utara. Sejak tahun 2003, Amerika Serikat melakukan perundingan dengan melibatkan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Korea Utara yang akhirnya memerlukan peran dari Six Party Talks yang merundingkan soal pengendalian pengembangan senjata nuklir (Xu, 2013). Negosiasi-negosiasi yang berlangsung ini pada akhirnya memunculkan kesepakatan bersama pada bulan September 2005, dimana dalam kesepakatan tersebut Korea Utara menyatakan bersedia untuk meninggalkan program nuklirnya di Yongbyeon, kembali masuk dalam perjanjian NPT (Non-Proliferation Treaty), memberikan izin bagi perwakilan IAEA untuk memonitor proses denuklirisasi tersebut dengan timbal balik berupa bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, penghapusan Korea Utara dari daftar negara-negara yang dianggap mendukung aktivitas terorisme, serta bantuan ekonomi dan bahan bakar (Xu, 2013).

F. Era Barack Obama (2009-2016)

Setelah berakhirnya masa kePresidenan George W. Bush yang dilanjutkan oleh Barack Obama, kerjasama Amerika Serikat dengan Korea Selatan tetap dipertahankan. Salah satunya dengan mengesahkan KORUS FTA yang mulai berlaku sejak 15 Maret 2012 dan program latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang makin sering diadakan perihal percobaan misil dan senjata pemusnah masal lainnya dari Korea Utara yang lebih sering di banding ketika di tahun-tahun sebelumnya (Williams, 2014). Pada pertemuannya Barack Obama dengan Park Geun-hye di Laos dalam rangka pertemuan KTT G20 yang pada hari sebelumnya di Hangzhou, Tiongkok, Barack Obama menyatakan bahwa aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan tetap kuat dan akan selalu terjaga terutama demi menghadapi ancaman yang dapat melanda Korea Selatan, kerja sama pertahanan rudal seperti pemasangan adalah sistem pertahanan murni untuk mencegah dan bertahan melawan ancaman Korea Utara (Defense, 2016). Hal tersebut terbukti dengan latihan-latihan gabungan militer yang sudah dilaksanakan, juga pemasangan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang sudah di pasang sejak tahun 2008. Latihan gabungan militer dilanjutkan oleh Barack Obama, pada tanggal 28 Februari 2009 program Foal Eagle dilaksanakan lagi dengan 29.000 tentara Amerika Serikat dan 200.000 tentara

Korea Selatan berpartisipasi dalam program tersebut sampai pada 18 April 2014 (Pike, 2017). Dan pada yang bergabung dalam operasi Foal Eagle 2014 ada 7.500 tentara Amerika Serikat dan 5.100 tentara tambahan dari wilayah Semenanjung Korea (Pike, 2017). Sampai di penghujung tahun 2016, berbagai program latihan gabungan militer Amerika Serikat dengan Korea Selatan telah dijalankan dan menstabilkan aliansi kedua negara tersebut.